

Antisipasi Kasus Covid 19 Melonjak, Pemerintah Pusat Ingatkan Daerah untuk Waspada

Balikpapan, Gerbangkaltim.com -Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas'ud mengikuti zoom meeting bersama beberapa Kementerian yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri termasuk Kementerian Kesehatan.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan kasus Covid 19 dan evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). "Pada prinsipnya kami disuruh harus waspada. Jangan sampai lonjakan ini terjadi seperti bola salju yang bisa langsung membesar dan banyak terkonfirmasi (Covid 19)," jelasnya ditemui usai zoom meeting di VIP Room Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Sabtu (5/2/2022) sore.

Rahmad mengatakan, pemerintah pusat akan memberikan arahan selanjutnya untuk segera ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah, dalam rangka penyebaran covid 19 yang harus diantisipasi. "Itu aja arahannya," ucapnya.

Dalam rapat Kepala Daerah dengan Kementerian tersebut, ia mengatakan Menteri Dalam Negeri menganjurkan agar PPKM mikro dihidupkan kembali mulai di tingkat RT. "Kami sudah hidupkan kembali PPKM di tingkat Kelurahan sampai RT," ujarnya.

Rahmad berharap kasus Covid 19 di Kota Balikpapan masih terkendali. Oleh karenanya, protokol kesehatan (prokes) terus digalakkan untuk mencegah penularan Covid 19 di Kota Balikpapan, sehingga masyarakat masih bisa untuk melakukan aktivitas, walaupun dengan pembatasan. "Doakan, mudah-mudahan Balikpapan masih aman," terangnya.

Meskipun saat ini, tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) atau

persentase pemakaian tempat tidur di rumah sakit Kota Balikpapan masih dibawah 0,6 persen. Akan tetapi, saat ini masih banyak yang melakukan isolasi mandiri (isoman) maupun isolasi terpadu (isoter). "Kami berharap jangan sampai bertambah," serunya.

Untuk mengantisipasi adanya lonjakan kasus Covid 19 di Kota Balikpapan, ia melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Seperti halnya, untuk perjalanan dinas luar daerah khususnya Jawa dan Bali yang sudah dibatasi. "Saya sudah instruksikan terutama Jawa Bali, kecuali penting untuk dihadiri tapi kalau bisa tidak dihadiri. Kan bisa melalui via zoom," tutupnya.(nik)